

DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN

Siti Witianti

Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: siti.witianti@unpad.ac.id

ABSTRAK

The relations between democracy and development has become wide discussion since world war two until now. The question rised whether democracy supports development or development supports democracy both in central and local level. Democracy has been choosed in many countries. Democracy marked by participation needed in development. Furthermore, democracy needs better people's capacity which only can be done in the development process. Comprehensive development concept stresses on the people. People become subject and object in the development. People's participation makes the result of development suits with the need of the people. There is an opinion that comprehensive development process might support democratization process.

Key words: *democracy, development, participation*

ABSTRAK

Sejak perang dunia kedua hingga sekarang hubungan demokrasi dan pembangunan menjadi salah satu perbincangan yang hangat. Pertanyaan yang menjadi pusat perhatian adalah apakah demokrasi dapat mendukung proses pembangunan atau sebaliknya apakah pembangunan dapat menunjang proses demokratisasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Demokrasi menjadi pilihan banyak negara, di dalam konsep demokrasi terdapat aspek partisipasi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Selain itu, dalam proses demokratisasi dibutuhkan kapasitas masyarakat yang memadai, dan itu hanya dapat dilakukan dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan yang komprehensif menekankan pada manusia, manusia merupakan subjek dan objek di dalam pembangunan, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dalamnya. Selain itu, muncul pendapat bahwa proses pembangunan yang komprehensif dapat mendukung proses demokratisasi.

Kata kunci: demokrasi, pembangunan, partisipasi

PENDAHULUAN

Proses pembangunan dan hasil dari pembangunan selalu menjadi objek kajian yang menarik para ilmuwan, setiap negara memerlukan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Akhir-akhir ini kajian pembangunan selalu dikaitkan dengan demokrasi, banyak yang mengkaji pembangunan dari segi prosesnya, seperti transparansi atau keterbukaan dalam pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan akuntabilitas dalam pembangunan, serta penegakan hukum dalam pembangunan dan lain sebagainya.

Hasil dari pembangunan pada kenyataannya tidak selamanya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di dalam suatu negara terutama di negara berkembang, akan

tetapi seringkali terjadi hasil dari pembangunan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir elite saja yang disebut dengan *trickle down effect*, artinya tidak terjadi pemerataan hasil pembangunan. Sehingga hal inilah yang menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat terhadap pemerintah, menuntut pemerintah untuk melakukan pembangunan secara adil.

Pembangunan pada akhir-akhir ini lebih dipusatkan pada manusia. Model pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered*) serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi.

Model pembangunan seperti ini bertujuan mengembangkan keefektifan politis yang dapat mengubah sikap masyarakat sebagai objek menjadi masyarakat yang aktif atau sebagai subjek, masyarakat yang aktif mampu dan mau memberikan kontribusi dalam proses pembangunan. Dan mereka pun akan berkembang menjadi masyarakat yang berpartisipasi dalam menentukan isu pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan perwujudan dari nilai demokrasi, sehingga pembangunan dapat dikatakan sebagai pendorong nilai-nilai demokrasi agar dapat berkembang.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tidak selamanya pembangunan dapat menghasilkan suatu negara yang demokratis secara substantif, karena kegagalan dari pembangunan yang terjadi selama sejarah berlangsung menunjukkan ketidakhadirannya menciptakan negara menjadi negara yang demokratis, justru melahirkan negara yang korup.

Kegagalan pembangunan pernah dirasakan di Indonesia, salah satu sebabnya dikarenakan sistem pemerintahan yang tercentralisasi sehingga hasil pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak semua masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan tersebut, selain itu korupsi merajalela dimana-mana. Pada masa tersebut pembangunan secara fisik dilakukan secara besar-besaran tetapi tidak dilakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia yang sangat luas ini. Pembangunan hanya terspusat di Pulau Jawa, sedangkan daerah di luar Pulau Jawa menjadi daerah yang tertinggal dikarenakan pembangunan tidak secepat di Pulau Jawa.

Partisipasi masyarakat ditekan, sehingga proses perumusan kebijakan tidak melibatkan masyarakat, akibatnya kebijakan yang hanya dibuat oleh segelintir elit di pemerintah pusat menyebabkan pembangunan tidak merata dan tidak terarah, proses perumusan kebijakan bersifat *top down*.

Desentralisasi pada akhirnya menjadi alternatif dari sistem sentralisasi yang dianggap tidak demokratis, desentralisasi dianggap mampu membawa kebijakan pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rodinelli dan Cheema (Marijan,

2015: 144} terkait dengan desentralisasi dan pembangunan menyimpulkan bahwa melalui desentralisasi, pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien termasuk dalam penyediaan barang-barang dan layanan publik.

Kebijakan sentralisasi menurut Sellers sering dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (dalam Marijan, 2015: 144) dikarenakan lingkungan, pasar lokal, perusahaan-perusahaan swasta dan struktur pemerintah lokal tidak selalu sama. Sementara itu produk kebijakan sentralisasi selalu cenderung bersifat tunggal dan menyeragamkan.

PEMBAHASAN

Stiglitz mengemukakan bahwa pembangunan memerlukan adanya perubahan cara berpikir, sebuah cara berpikir dimana perubahan tersebut tidak hanya dapat diperintah atau dipaksa dari luar, akan tetapi perubahan itu harus datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Pembangunan tersebut harus mengakar di masyarakat melalui diskusi terbuka di ruang publik dan harus partisipatoris di dalam prosesnya. Partisipasi dalam hal ini dimaksudkan untuk menjadikan masing-masing rakyat turut menentukan kebijakan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan agar perubahan ekonomi yang terjadi tidak menghilangkan hak-hak sipil dan akses rakyat dalam mempengaruhi kebijakan yang menyangkut hidupnya.

Partisipasi yang dimaksud oleh Stiglitz mencakup pelaksanaan transparansi, keterbukaan, dan juga memberikan hak suara kepada publik untuk menyuarakan kepentingannya. Menurut Stiglitz proses yang partisipatoris akan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi di dalam proses perumusan kebijakan. Stiglitz mengemukakan model pembangunan yang komprehensif tidak hanya memperhatikan hasil sebagai tujuan, tetapi sangat menekankan pada proses pembangunan itu sendiri. Proses yang partisipatoris dapat semakin melegitimasi dan mengefektifkan kebutuhan masyarakat yang ada.

Menurut Stiglitz berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang melibatkan partisipasi masyarakat menunjukkan kemajuan yang pesat dalam pembangunan ekonomi dan dapat semakin memaksimalkan bantuan asing untuk proses pembangunan.

Akan tetapi, pada sistem politik yang demokratis sekalipun selalu ada segelintir elit yang selalu berusaha untuk menguasai proses pengambilan keputusan demi memenuhi kepentingannya, dan hal ini perlu diatasi dengan beberapa cara seperti kebijakan redistributif melalui pajak dan dengan membuat undang-undang anti monopoli, kedua dengan memperkuat check and balances. Untuk menjalankan kedua strategi tersebut ada tiga elemen yang harus diperhatikan yaitu pertama dengan cara memperkuat masyarakat sipil yakni dengan memperkuat NGO, serikat pekerja, kelompok kepentingan, partai politik dan lembaga think tank. Dimana mereka memiliki tugas memastikan berjalannya proses yang partisipatoris dan mensosialisasikan agenda politik. Menurut Stiglitz dukungan masyarakat sipil sangat signifikan dalam mengimposementasikan proses pembangunan yang partisipatoris agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya oleh segelintir orang saja. Elemen kedua adalah pemerintah yang tidak hanya harus meningkatkan transparansi, akan tetapi juga harus mengakui adanya hak dasar rakyat. Masyarakat sipil memiliki hak untuk memperoleh akses informasi atas segala yang dilakukan oleh pemerintah. Elemen ketiga adalah bahwa masyarakat sipil memiliki hak atau memiliki jalur hukum untuk menuntut segala peraturan perundang-undangan yang membatasi asirasi publik dan melakukan monopoli atas aktivitas ekonomi rakyat.

Dengan demikian bahwa keterlibatan ketiga elemen strategi tersebut sangat menentukan suatu proses pembangunan demokratis atau tidak, civil society yang otonom dan independen, pemerintah yang terbuka, penguasaan atas hak asasi manusia akan dapat memperbaiki proses pembangunan menjadi lebih demokratis, dan hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Stiglitz perubahan yang terjadi dalam pembangunan harus berlangsung secara sistemik dan masyarakat harus memiliki kesadaran diri untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Pembangunan yang bertransformasi harus dapat diterima oleh setiap warga masyarakat, selain itu, keputusan harus diambil melalui proses yang partisipatoris, melalui proses tersebut harus mampu mengakomodasi semua kepentingan masyarakat sehingga pertumbuhan pertumbuhan

ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Stiglitz sangat menekankan keberhasilan pembangunan pada proses kebijakan yang partisipatif, dimana keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pembangunan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari proses pembangunan yang berlangsung, karena masyarakat lebih memahami apa yang dibutuhkan mereka.

Banyak kajian yang sudah dilakukan tentang hubungan atau pengaruh dari demokrasi terhadap pembangunan atau sebaliknya pengaruh pembangunan terhadap demokratisasi. Beberapa pendapat terkait dengan hal ini berbeda-beda ada yang mengatakan hubungan positif dan ada pula yang berpendapat bahwa kedua variabel tersebut tidak ekuivalen.

Adam Przewoski dalam bukunya *democracy and deveopment* menjawab pertanyaan tentang apakah demokrasi kondusif bagi pembangunan ekonomi. Banyak pemikir telah menulis tentang hubungan demokrasi dan pembangunan. Penjelasan ini berkonsentrasi pada pembahasan dalam artian sempit yaitu bagaimana sistem politik dan pembangunan ekonomi saling mempengaruhi. Menjelaskan hubungan antara pembangunan dan demokrasi dikemukakan oleh Minxin Pei (dalam Farrukh, 2001: 36) dengan menjelaskan tentang pertanyaan apakah Kekayaan berfungsi untuk mengembangkan Demokrasi?

Dampak pembangunan ekonomi pada transformasi sistem politik telah lama dianggap langsung dan positif, secara umum diasumsikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan mengarah munculnya lembaga-lembaga demokratis dan akhirnya dari demokrasi itu sendiri, seperti berikut:

1. Pembangunan ekonomi mengubah struktur sosial dan menciptakan kelas menengah yang menyediakan basis sosial bagi demokrasi. Ini adalah Proses yang paling penting.
2. Pembangunan ekonomi, sebagai produk yang menyebabkan munculnya nilai-nilai politik baru (seperti meningkatkan rasa individualitas, otonomi pribadi, dan keyakinan dalam kebebasan hak pribadi dan pilihan) yang mendukung lembaga-lembaga dan praktek demokrasi.
3. Efek langsung dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan tingkat pendidikan.

Sebuah warga berpendidikan cenderung untuk menjadi lebih berpengetahuan tentang proses politik dan lebih sadar akan hak-haknya. Itu juga lebih waspada dalam membela hak-hak, dan memiliki lebih efektif berarti melakukannya.

4. Keberhasilan pembangunan menghasilkan kekayaan ekonomi, memungkinkan aktor-aktor untuk mengumpulkan sumber daya yang meningkatkan kemandirian mereka dari negara, sehingga memperkuat masyarakat sipil sebagai penyeimbang untuk negara. Efek lain dari pengumpulan kekayaan adalah kemampuannya untuk menyelesaikan konflik redistribusi (*semakin besar kue, semakin besar kemungkinan setiap orang akan mendapatkan potongankue tersebut*).
5. Karena keberhasilan pembangunan lebih mungkin terjadi secara ekonomi terbuka, juga dapat mempromosikan hubungan sosial, budaya, dan politik dengan masyarakat internasional. Hubungan ini bertindak untuk memfasilitasi aliran informasi, dan untuk melemahkan kemungkinan terjadinya pemerintahan otoriter; dan dengan membuka peluang ekonomi terhadap pengaruh eksternal, untuk membatasi penguasa otokratis.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dapat berpengaruh terhadap demokrasi dan proses demokratisasi, menurut pendapat tersebut bahwa pembangunan ekonomi dapat mendorong terbentuknya sistem yang demokratis. Penelitian akademik dalam beberapa tahun terakhir telah mulai untuk menjelaskan bagaimana pembangunan ekonomi dapat mempengaruhi munculnya dan daya tahan demokrasi.

Akan tetapi, Pei juga menjelaskan dalam sebuah studi statistik yang mengkaji tentang hubungan antara kekayaan dan demokrasi, Adam Przeworski dan Fernando Limongi justru membantah anggapan bahwa meningkatnya kekayaan ekonomi mengarah ke demokrasi, Alasannya bahwa kekayaan memiliki efek yang dapat diukur pada tingkat kelangsungan hidup demokrasi, tetapi tidak pada laju munculnya. Dengan kata lain, sejauh kekayaan yang merupakan variabel independen, demokrasi yang miskin lebih mungkin runtuh dari demokrasi kaya. Lebih khusus, analisis Przeworski dan Limongi menunjukkan bahwa meningkatnya kekayaan tidak meningkatkan demokrasi;

dalam kasus-kasus tertentu, misalnya, otokrasi kaya tetap otokratis meskipun meningkatnya kekayaan. Tapi efek dari kekayaan di atas tertentu level pada daya tahan demokrasi yang kuat: probabilitas kelangsungan hidup demokrasi naik dengan kekayaan diukur dalam per pendapatan per kapita. Ketika pendapatan per kapita adalah \$ 1.000 (diukur dalam pembelian daya paritas, atau PPP), harapan hidup demokrasi adalah delapan tahun. Ketika pendapatan per kapita antara \$ 2.001 dan \$ 3.000 harapan hidup demokrasi naik sampai 26 tahun; dan ketika pendapatan per kapita naik di atas \$ 6.000 demokrasi memperoleh keabadian. Bukti statistik menunjukkan bahwa otokrasi dapat bertahan di atas ambang batas kekayaan tersebut, dari mana Przeworski dan Limongi menyimpulkan bahwa gagasan linearitas antara kekayaan dan demokrasi harus ditolak.

Penelitian oleh ilmuwan politik lainnya, sebaliknya, telah menyimpulkan bahwa kekayaan meskipun sederhana menghasilkan efek pada demokrasi secara terukur. Sebuah analisis statistik yang dilakukan oleh John Londregan dan Keith Poole melaporkan yang dua kali lipat dari pendapatan per kapita memiliki efek sangat besar pada negara otoriter; biasanya, dua kali lipat dari per kapita pendapatan akan meningkatkan derajat demokrasi dalam negara otoriter sebesar 30 persen. Dampak kenaikan kekayaan pada negara otoriter kecil, namun, dua kali lipat dari per kapita pendapatan yang mengarah ke peningkatan 5 sampai 15 persen di tingkat demokrasi di rezim paling represif. Hukum hasil yang menurun juga berlaku: dua kali lipat dari pendapatan per kapita hanya sedikit meningkatkan derajat demokrasi di societies.³ relatif terbuka.

Kedua studi tersebut mungkin berbeda dalam kesimpulan mereka tentang tepat efek dari pembangunan ekonomi demokrasi, namun ketidaksetujuan mereka dirinci seharusnya tidak mengaburkan fakta sentral secara umum: bahwa pembangunan bermanfaat untuk demokrasi.

Adam Przewoski dalam bukunya *democracy and deveopment* menjawab pertanyaannya tentang apakah demokrasi kondusif bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi pada saat ini dirasa sangat diperlukan dalam pengembangan masyarakat luas. Partisipasi. Partisipasi masyarakat dapat membantu lembaga-lembaga pemerintah dalam pembangunan.

Perubahan besar yang dihadapi dunia salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi pengetahuan yang menjanjikan dan membutuhkan partisipasi dalam masyarakat. Partisipasi menentukan dalam penyuksesan ekonomi pengetahuan. karena pada dasarnya organisasi kerja berbasis pengetahuan memerlukan pengakuan otonomi dan pola pikir sendiri serta harus mendorong keterlibatan aktif dari peserta didik.

Keterlibatan aktif dari peserta didik harus didorong dengan motivasi yang intrinsik untuk kegiatan tersebut. Intsemtof eksternal dapat memodifikasi perilaku dalam jangka pendek akan tetapi mereka akan berubah dengan terpaksa, sementara motivasi internal akan mengambil alih ketika insentif dihapus. Prinsip ini menjadi dasar dari transformasi berbasis pengetahuan dalam negara. Reformasi dapat gagal ketika negara melemahkan motivasi rakyat dan melemahkan kepercayaan diri mereka atas kemampuan yang mereka miliki. Jika agen eksternal tidak berperan sebagai katalis pembangunan hal tersebut akan menciptakan impotensi. Partisipasi penting dalam kegiatan luas di negara berkembang.

Partisipasi dan transformasi dalam masyarakat ditandai dengan adanya perubahan dari masa tradisional hingga moderen. Pesatnya pembangunan bukan hanya oleh suntikan modal yang menungkat akan tetapi faktor sumber daya yang produktif lebih mampu mempengaruhi pembangunan, sikap manusia yang produktif lebih bisa mempengaruhi hasil pembangunan sesuai yang diharapkan. Sikap manusia yang produktif dan ikut berpartisipasi dalam segera bentuk dapat memberikan dorongan tersendiri dalam negara terutama masyarakat yang aktif dalam pemantauan atau pengawasan terhadap negara. Partisipasi masyarakat dapat berguna dalam mengontrol sektor pemerintahan sehingga sektor ekonomi yang sedang dibangun oleh masyarakat akan mudah terlaksana jika didorong pula oleh kebijakan yang sejalan.

Dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi dari kurangnya partisipasi masyarakat kepada pemerintah akan meimbulkan kekuasaan politik yang besar dari pemerintah untuk mengintimidasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki kebijakan yang terbuka dan pemerintah yang transparan akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti pertumbuhan yang lebih cepat dan keterbukaan

untuk ekspor dan impor, bagaimanapun bahwa fokus kekuasaan ekonomi hampir pasti diterjemahkan kedalam upaya untuk mendapatkan pengaruh politik, sehingga partisipasi dalam masyarakat terhadap negara adalah merupakan hal yang penting bukan dalam konteks itu saja pemerintahpun harus berpartisipasi untuk merangkul masyarakat agar lebih dekat dan terbuka kepada masyarakat dalam suatu negara.

Pembangunan sering diidentikan dengan pembangunan ekonomi, karena apabila meningkatkan pembangunan ekonomi perkapita ini dapat membantu pembangunan pelayanan pendidikan dan kesehatan, negara yang memiliki pendapatan perkapita yang besar memiliki indikator sosial yang lebih tinggi pula. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat bertujuan untuk pembangunan sosial yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai dan untuk mendamaikan perbedaan pendapat yang merupakan prasyarat dalam sebuah masyarakat.

Seymour Martin Lipset menjawab hipotesis bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan demokrasi dalam esainya yang berjudul *'some Social Requisites of Democracy'*, membahas hubungan spesial antara pembangunan ekonomi dan demokrasi. Lipset mengatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi sebuah negara untuk bisa memelihara berjalannya fungsi-fungsi demokrasi. Mendasari argumennya dengan data dan korelasi yang positif antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik, atau demokratisasi. Lipset mempunyai penjelasan yang multi-tiered mengapa pembangunan ekonomi penting untuk demokrasi.

Pertama, Lipset mengatakan pembangunan dapat membantu kelas-kelas yang lebih rendah untuk mendapatkan kekayaan, pendidikan dan kesejahteraan yang menghasilkan pandangan politik yang moderat dari kelas tersebut. Dengan kata lain, karena pembangunan memberikan kelas yang lebih rendah sesuatu untuk dipertahankan, maka mereka yang biasa menyertai gerakan kelas bawah dapat ditahan karena jika mereka melawan maka tidak ada lagi ruang untuk menikmati pembangunan bagi mereka. Terlebih lagi kelas bawah yang lebih kaya akan membuat kelas atas tidak lagi waspada terhadap demokrasi karena mereka tidak lagi memandang kelas bawah sebagai *subhuman*.

Kedua, lipset mengatakan bahwa modernisasi dapat memberikan peluang bagi kelas menengah untuk memasuki derajat kelas atas atau kelas bawah. Hasilnya, kelas menengah bisa menjadi kelompok ekstrim yang menjadi ancaman demokrasi dan juga menjadi kelas yang memegang kekuasaan.

Ketiga, pendapatan yang lebih besar dari kelas yang lebih rendah, maka ini dapat mendukung dihelatnya pemilihan. Hal ini dikarenakan di negara-negara kaya, mengontrol sedikit aspek kehidupan kelompok-kelompok sehingga bisa mendistribusikan kesejahteraan tanpa adanya kelompok oposisi yang besar, dan berkurangnya korupsi dan nepotisme.

Akhirnya, lebih besarnya kesejahteraan di sebuah negara akan menghadirkan institusi negara yang bisa berfungsi secara independen dari negara, sehingga mencegah monopoli kekuasaan dari negara, jika negara tersebut didominasi oleh satu partai.

PENUTUP

Perdebatan terkait hubungan antara pembangunan dan demokrasi didasarkan pada praktek-praktek di negara masing-masing, berdasarkan praktek demokrasi dan praktek pembangunan, menunjukkan adanya perbedaan hasil, sehingga menimbulkan dua kubu pendapat, ada penelitian yang menunjukkan hasil adanya pengaruh positif antara demokrasi dan pembangunan, akan tetap,

ada juga penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif antara demokrasi dan pembangunan. Pengalaman di Indonesia menunjukkan adanya pembangunan di masa sentralistis secara besar-besaran, akan tetapi efeknya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Sehingga pada akhirnya, sistem desentralisasi menjadi pilihan di masa reformasi, dengan anggapan dengan adanya desentralisasi dari pemerintah pusat kepada daerah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi rakyat dan mendorong demokratisasi di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Przeworski and Fernando Limongi, "Modernization: Theories and Facts," *World Politics*, vol. 49 (January 1997).
- John Londregan and Keith Poole, "Does High Income Promote Democracy?" *World Politics*, vol. 49 (October 1996).
- Marijan, Kacung. 2015. *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sen, Amartya. 1999. *Development As A Freedom*. Alfred A. Knopf. Inc, New York.
- Iqbal and Jong-I You. 2001. *Democracy, Market Economics, and Development An Asian Perspective*. The World Bank, USA (Chapter 3)